



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 85 TAHUN 2018  
TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 80 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 82);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 75);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019.

#### BAB I

##### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

#### BAB II

##### SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

##### Pasal 2

- (1) Renja PD Tahun 2019 ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2019.

(2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;

Bab III : Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;

Bab V : Penutup.

### Pasal 3

- (1) Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri atas:
- a. Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
  - b. Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
  - d. Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;
  - e. Rencana Kerja Badan Daerah;
  - f. Rencana Kerja Dinas Daerah;
  - g. Rencana Kerja Kantor Daerah; dan
  - h. Rencana Kerja Kecamatan.
- (2) Rencana Kerja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - b. Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
  - c. Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan
  - d. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (3) Rencana Kerja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f. Terdiri atas:
- a. Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
  - b. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
  - c. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - d. Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang;
  - e. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
  - f. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - g. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - h. Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
  - i. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
  - j. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- k. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - l. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
  - m. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - n. Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
  - o. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
  - p. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
  - q. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan;
  - r. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
  - s. Rencana Kerja Dinas Pariwisata.
- (4) Rencana Kerja Kantor Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (5) Rencana Kerja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri atas:
- a. Rencana Kerja Kecamatan Srandakan;
  - b. Rencana Kerja Kecamatan Sanden;
  - c. Rencana Kerja Kecamatan Pajangan;
  - d. Rencana Kerja Kecamatan Sedayu;
  - e. Rencana Kerja Kecamatan Pandak;
  - f. Rencana Kerja Kecamatan Kasihan;
  - g. Rencana Kerja Kecamatan Bantul;
  - h. Rencana Kerja Kecamatan Bambanglipuro;
  - i. Rencana Kerja Kecamatan Kretek;
  - j. Rencana Kerja Kecamatan Pundong;
  - k. Rencana Kerja Kecamatan Sewon;
  - l. Rencana Kerja Kecamatan Jetis;
  - m. Rencana Kerja Kecamatan Imogiri;
  - n. Rencana Kerja Kecamatan Dlingo;
  - o. Rencana Kerja Kecamatan Pleret;
  - p. Rencana Kerja Kecamatan Banguntapan; dan
  - q. Rencana Kerja Kecamatan Piyungan.

#### Pasal 4

Uraian rinci Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal, 27 Juli 2018  
BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 27 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 NOMOR 85

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
U.B. Kepala Bagian Hukum

